

DESAIN DAN INSTRUMEN BEST PRACTICE PADA KOLABORASI SMART CITY DAN KAMPUNG TEMATIK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Husni Mubaroq¹,
Nourma Ulva Kumala Devi²
Email : husnimubaroq139@gmail.com

Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Pembangunan Daerah juga dilandasi kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perencanaan seperti ini diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya membangun lingkup pusat Kota dan Kabupaten. Akan tetapi menyeluruh hingga ke setiap wilayah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Setiap kecamatan bahkan setiap kelurahan memiliki keunggulan dan potensi wilayah masing-masing yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan kriteria *Best Practice* yang disesuaikan dengan arah pembangunan pusat kota/kabupaten dan pembangunan disetiap kecamatan dan kelurahan. Maka dapat mengkolaborasikan konsep *Smart City* dan Desa/Kampung Tematik. Sehingga disetiap wilayah di Indonesia dapat menerapkan kolaborasi konsep *smart city* dan konsep desa tematik pada pembangunan. Kontribusi dalam riset yang diberikan relevan terhadap pengembangan daerah dengan kolaborasi *smart city* dan desa tematik yang sedang dijalankan. Secara keseluruhan, dapat menjadi sumber pembelajaran bagi tahapan pengembangan yang baru khususnya di Kota. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Riset dengan menggunakan latar alamiah (*natural setting*), dengan mengartikan peristiwa yang terjadi dan mengkaitkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan kriteria *Best Practice* yang disesuaikan dengan arah pembangunan pusat kota/kabupaten dan pembangunan disetiap kecamatan dan kelurahan. Maka dapat mengkolaborasikan konsep *Smart City* dan Desa/Kampung Tematik. Pembangunan Daerah dapat diterapkan dengan program kolaborasi *smart city* dan Kampung/desa tematik.

Kata kunci: Praktik terbaik; Kampung Tematik; Kota Pintar

ABSTRACT

Regional development is also based on regional autonomy policies and fiscal decentralization policies, which are regulated by Law Number 22 of 1999 and has been revised into Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as well as Law Number 23 of 1999 and has been revised into Law -Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Center and the Regions. Planning like this is needed so that regional development does not only build the scope of the city and district centers. However, it is comprehensive to every area at the sub-district and village levels. Each sub-district and even every kelurahan has its own advantages and potentials that need to be improved and developed. Based on the Best Practice criteria that are adjusted to the direction of the development of the city/district center and development in each sub-district and village. Then they can collaborate on

the concept of Smart City and Thematic Villages/Kampungs. So that every region in Indonesia can apply the collaboration of smart city concepts and thematic village concepts to development. This research uses a qualitative approach. Research using a natural setting, by interpreting events that occur and linking various existing methods. Based on the Best Practice criteria that are adjusted to the direction of the development of the city/district center and development in each sub-district and village. Then they can collaborate on the concept of Smart City and Thematic Villages/Kampungs. Regional development can be implemented with smart city collaboration programs and thematic villages/villages.

Kata kunci: *Best Practices; Thematic Villages; Smart City*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di Negara Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam pembangunan nasional. Peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan meningkatkan upaya keselarasan dan keseimbangan untuk pembangunan di pusat dan pembangunan di daerah(Djadjuli, 2018). Meminimalisir kesenjangan sosial dan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pembangunan Daerah juga dilandasi kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Regulasi tersebut memperkuat transisi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing. Bentuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang sangat penting untuk memotivasi peningkatan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk membangun daerah yang berorientasikan pada kemajuan dan perkembangan yang

berkelanjutan di daerah, maka diselenggarakan rancangan pembangunan secara universal, terprogram dan terpadu. Bentuk pembangunan yang terprogram dengan progres yang dinamis akan berkaitan dengan peran partisipasi warga maupun unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan proses pembangunan. Pentingnya perencanaan adalah menggunakan potensi yang tersedia dan berbagai solusi lain yang dibutuhkan untuk menyesuaikan target yang ingin dicapai dalam pembangunan(Suparmoko, 2020). Perencanaan pembangunan memuat rancangan strategi yang penting dan urgensi dalam pembangunan. Rencana tersebut melibatkan pemerintah dan masyarakat serta komunitas masyarakat, dilaksanakan secara cermat dalam penyusunan strategi terbaik untuk mencapai banyak rangkaian tujuan. Rencana mengacu pada alokasi dan tekad untuk meraih tujuan, lokasi, masa, peserta

dan prosedur yang terlibat, sehingga dapat menjadi dokumen untuk penyusunan rencana pembangunan di masa depan (Suparmoko, 2020).

Salah satu teknik perencanaan pembangunan yang dilakukan daerah adalah Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah upaya dengan tahapan rencana pembangunan dengan target untuk mengarahkan rangkaian program dengan pendekatan dari bawah ke atas atau *bottom-up* (Sidik, 2016). Musrenbang dilakukan pada tingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan. Musrenbang melibatkan seluruh pejabat daerah dan masyarakat disetiap kecamatan dan kelurahan. Pembangunan tingkat daerah juga perlu memperhatikan kondisi, potensi, dan keunggulan disetiap wilayah.

Perencanaan seperti ini diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya membangun lingkup pusat Kota dan Kabupaten. Akan tetapi menyeluruh hingga ke setiap wilayah ditingkat kecamatan dan kelurahan. Setiap kecamatan bahkan setiap kelurahan memiliki keunggulan dan potensi wilayah masing-masing yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan (Wihana, 2017).

Keselaras dan keseimbangan pembangunan di Pusat pemerintahan daerah dan pusat kegiatan masyarakat dengan pembangunan disetiap kecamatan dan kelurahan perlu diterapkan dengan konsep *Best Practice*. *Best practice* merupakan labeling yang dikenakan pada indikator-indikator pada setiap aspek yang tidak digeneralisasikan. *Best practice* merupakan implementasi dari ide yang diharapkan mencapai keberhasilan dan mengutamakan efisiensi dan efektivitas (Mulyadi, 2009). *Best practice* menjadi praktek tepat dalam birokrasi. Keunggulan

Best practice adalah dapat diduplikasi di daerah lain.

Pembangunan di pusat Kota/Kabupaten dapat menerapkan konsep *Smart city*. *Smart City* dilakukan dengan menyesuaikan teknologi. *Smart City* adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. (Muliarto, 2015) Menurut Giffinger dalam Jung Hoon yang dirujuk oleh Hendri Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi (tradisional) dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif (Muliarto, 2015).

Kolaborasi pelaksanaan pembangunan *smart city* dan kampung tematik menekankan pada pembangunan dipusat kota dengan prinsip *smart city*. Pengembangan pusat kota atau daerah pemerintahan dengan konsep *smart mobility, smart living, smart government, smart environment, smart economy, dan smart people*. Khusus di setiap wilayah seperti lingkup kecamatan bahkan setiap kelurahan melakukan pembangunan dengan konsep kampung tematik. Orientasinya membangun wilayah dengan menonjolkan potensi perwilayah, mengedepankan kearifan lokal.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bagaimana desain dan instrumen pelaksanaan kolaborasi Konsep Smart City dan Desa Tematik sesuai dengan penerapan best practice untuk pembangunan daerah?

Sehingga disetiap wilayah di Indonesia dapat menerapkan kolaborasi konsep *smart city* dan konsep kampung

tematik pada pembangunan. Kontribusi dalam riset yang diberikan relevan terhadap pengembangan daerah dengan kolaborasi *smart city* dan desa tematik yang sedang dijalankan. Secara keseluruhan, dapat menjadi sumber pembelajaran bagi tahapan pengembangan yang baru khususnya di Kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Best practice dalam konteks lingkungan Perkotaan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi yang lebih daripada yang lainnya (*outstanding contributions*) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di Kota- kota maupun masyarakat umum lainnya (Prasojo & Kurniawan, 2008). Secara umum juga memaparkan melalui beberapa poin utama yang harus dipenuhi, antara lain, memiliki dampak yang dapat ditujukan dan diperkenalkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat pada umumnya; berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Kemudian dijabarkan kriteria yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan program *best practice*, kriteriakriteria tersebut antara lain (Prasojo et al., 2007):

a. Dampak (*impact*)

Sebuah *best practice* harus menunjukkan sebuah dampak langsung yang positif dan dapat dilihat serta dirasakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan hak-haknya.

b. Kemitraan (*Partnership*)

Sebuah *best practice* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor serta stakeholder yang terlibat didalamnya. Setidaknya ada melibatkan 2 pihak yang saling berintegrasi.

c. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan Legislasi, kebijakan sosial, kerangka institusional, serta efisiensi, transparan, dan manajemen yang akuntabel.

d. Kepemimpinan (*Leadership*)

Best practice harus digerakkan dengan gaya kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan publik yang diambilnya.

e. Transfer ke daerah lain (*Transferability*)

Setiap daerah yang melakukan inovasi sudah pasti harapannya mendapatkan dampak positif bagi daerahnya. Hal tersebut dapat menjadi *lesson- learned* atau pembelajaran bagi daerah lainnya sehingga penerapannya dapat dicontoh dan dijalankan di daerah tersebut tentunya dengan segala jenis pertimbangan dan penyesuaian dengan konteks lokalnya tersebut.

Berdasarkan kriteria *Best Practice* yang disesuaikan dengan arah pembangunan pusat kota/kabupaten dan pembangunan disetiap kecamatan dan kelurahan. Maka dapat mengkolaborasi konsep *Smart City* dan Desa/Kampung Tematik.

Smart City menerapkan metode komprehensif yang menata dan mengatur kota dalam berbagai sektor. Metode tata kota dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan tetap mempertahankan kearifan lokal untuk mempermudah kegiatan masyarakatnya. Pada intinya konsep *Smart City* adalah bagaimana cara menghubungkan antara berbagai aspek seperti infrastruktur, manusia, teknologi, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, dan mobilitas. Serta mengintegrasikan semua aspeknya untuk membuat sebuah kawasan yang ramah lingkungan, efisien, dan tentunya layak huni (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Sedangkan untuk pembangunan kecamatan dan kabupaten dapat menggunakan konsep kampung atau desa tematik. Konsep kampung atau desa tematik merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan tantangan dan masalah kebutuhan masyarakat khususnya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari segi wilayah, sarana prasarana. Kampung atau desa tematik dapat meningkatkan dan memacu ekonomi lokal yang orientasinya mengolah potensi yang ada di masyarakat sebagai imunitas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas wilayah (Simatupang, 2015).

Kampung atau desa tematik merupakan titik sasaran dari sebagian wilayah kelurahan yang dilakukan perbaikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Sihotang & Nugroho, 2021): Membangun lokasi pemukiman yang layak huni atau peningkatan dan perbaikan kondisi lingkungan; Peningkatan penghijauan wilayah yang intensif; Keterlibatan secara aktif dan partisipasi masyarakat; Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Riset dengan menggunakan latar alamiah (*natural setting*), dengan mengartikan peristiwa yang terjadi dan mengkaitkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2018)

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar dalam proses pencarian makna pada fenomena pelaksanaan *best practice* pada pembangunan *smart city* dan desa/kampung tematik untuk pembangunan daerah dapat dilakukan kajian yang komprehensif, detail, natural dan aktual. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara empiris fenomena yang terjadi di lapangan atau pada objek riset. Metode ini dianggap sesuai dan cocok dengan permasalahan dan tujuan yang diangkat melalui riset ini. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisa dan mengemukakan makna suatu fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Melalui metode deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau memaparkan secara terperinci atau detail penerapan *best practice* dalam perencanaan pembangunan daerah dengan konsep kombinasi *Smart City* dan desa/kampung tematik. Pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan pendekatan terhadap objek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan studi pustaka dan observasi peneliti. Dalam penelitian ini fokus kajian dititikberatkan pada implementasi perencanaan pembangunan daerah dengan studi desain dan instrumen *best practice*

pada pelaksanaan kolaborasi konsep smart city dan desa tematik, meliputi : Menggambarkan dan menganalisa desain dan instrumen best practice pada konsep smart city; Menggambarkan dan menganalisa desain dan instrumen best practice pada konsep desa tematik; Menganalisa desain dan instrumen best practice pada kolaborasi konsep smart city dan desa tematik untuk pembangunan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Desain dan instrumen best practice pada konsep *smart city*

1. Dampak (impact)

Best practice dari *smart city* dapat memberikan dampak disetiap sektor untuk kepentingan publik (Rizkinaswara, 2020) (Putri et al., 2021).

- a. Smart Economy (Ekonomi Cerdas) ; Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Smart Economy, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

- b. Smart Mobility (Mobilitas Cerdas) ; Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
- c. Smart Environment (Lingkungan Cerdas) ; Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.
- d. Smart People (Masyarakat Cerdas) ; Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal usaha (human capital), maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam

mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

e. Smart Living (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup) ;

Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

f. Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas) ;

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

2. Kemitraan (Partnership)

Best practice dari *smart city* perlu melibatkan pihak-pihak untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program pembangunan daerah (Simatupang, 2015). Minimal melibatkan 2 aktor maupun beberapa aktor dan *stakeholder* dalam program untuk saling bekerjasama. Sehingga, untuk mendukung suatu kota dalam menuju level ke lima di atas, maka diperlukannya *stakeholders* yang perlu dilibatkan dalam pengembangan konsep Smart City, antara lain : Government, Academician, Citizen/civil community, Developers, Media dan Private sectors. Keseluruhan *stakeholders* tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem kota pintar yang terintegrasi. Akademisi memberikan sumbangan saran kebijakan berdasarkan riset dan penelitian yang mereka lakukan. Developer membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi. Media

mempromosikan dan mensosialisasikan semua program. Pihak swasta mendukung dengan modal, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan mengubah kebiasaan lama yang buruk dan mempraktikkan yang baru. Jika salah satu pihak tidak berkontribusi, maka konsep ini tidak akan berjalan dengan baik

3. Keberlanjutan (Sustainability)

Best practice dari *smart city* menerapkan keberlanjutan agar program terus dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka konseptual *smart city* dalam pencapaian tujuan keberlanjutan kota dalam dimensi-dimensinya yaitu dimensi ekologi, ekuiti, ekonomi, dan livabilitas dapat diuraikan di bawah ini (Simatupang, 2015).

a. Keberlanjutan ekonomi (sustainability of economy)

Kota menghadapi tantangan kemiskinan, kelangkaan sumber daya, dan persaingan ekonomi. Krisis keuangan global dan kelangkaan sumber daya sedang dihadapi dunia. Kota perlu menyediakan warganya dengan kapasitas untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi, dan menarik bisnis dan modal. Kota perlu mampu bersaing secara ekonomi dengan daerah-daerah lainnya. Karena hal itu perlu dikembangkan kota dengan ICT yang memungkinkan adanya e-business, e-commerce, membantu pemaknufakturan yang maju, membantu penyediaan jasa,

membantu terciptanya inovasi baru, membantu pemodelan produk, jasa, dan business baru. Kota dengan ICT juga dapat membantu saling terkoneksi dan kelekatan internasional lokal dan global dengan aliran barang, jasa, pengetahuan fisik dan virtual.

b. Keberlanjutan ekuitas (sustainability of equity)

Kota menghadapi eksklusi sosial dalam bentuk seperti ras, agama, dan tingkat kekayaan, kondisi fisik dan psikologi, identitas gender. Kota seharusnya menjadi tempat tinggal bersama untuk segala masyarakat dengan segala jenis keragaman sosial. Kota perlu menyediakan warganya kepemilikan atau tempat tinggal dan tempat berusaha yang diinginkannya dan aksesibilitas kepada infrastruktur kota dan fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan secara adil. Karena hal itu perlu dikembangkan kota dengan ICT yang dapat menyediakan kepada seluruh warganya tanpa memandang perbedaan sosial aksesibilitas kepada informasi yang terbuka yang diperlukan untuk menjalankan kehidupannya. Termasuk di dalamnya informasi kepada infrastruktur kota dan pelayanan publik yang terkoneksi dengan ICT. Kota dengan ICT dapat menghindari kekuasaan dalam segala bentuknya yang dapat

mengeklusi masyarakat tertentu terhadap infrastruktur publik dan pelayanan publik karena masyarakat mendapatkan aksesibilitas informasi yang adil.

c. Keberlanjutan ekologi (sustainability of ecology)

Kota menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan utamanya oleh pembangunan dan pengoperasian kota oleh warganya maupun pihak luar sebagai dampak dari penggunaan lahan, sumber daya lainnya seperti material, energi, air, dan juga sebagai dampak buangan kota berupa sampah dan pencemaran. Kerusakan lingkungan ini telah menyebabkan terancamnya kehidupan manusia dan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Karena hal itu perlu dikembangkan kota dengan ICT yang penggunaan sumber daya dengan minimal dan efisien dan juga pengeluaran sampah, emisi dan pencemaran pada infrastruktur dan pelayanan publik yang diciptakan atau disediakan bagi masyarakat. ICT membantu dalam memonitor atau mengendalikan penggunaan sumber daya tertentu atau pengeluaran sampah atau pencemaran yang besarnya tidak melampaui yang ditetapkan sebelumnya. ICT membantu pengurangan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari dengan perolehan

informasi dan pelayanan yang bisa diakses di tempat seorang sedang berada tanpa perlu meninggalkan tempatnya karena adanya pelayanan elektronik. ICT membantu pengurangan penggunaan material dalam kegiatan sehari-hari dengan perolehan informasi yang tidak memerlukan material, seperti kertas, dalam penyampaian informasi.

d. Keberlanjutan livabilitas (sustainability of livability)

Kota menghadapi tuntutan livabilitas dari tempat tinggalnya di kota dan yang semakin tinggi sejalan dengan peningkatan kebutuhan dasar hidupnya dan kualitas hidupnya. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sekedar tempat tinggal dan tempat kerja, tetapi juga yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan publik bukan hanya memenuhi standar kualitas juga berproses lebih cepat dan lebih mudah. Karena hal itu perlu dikembangkan kota dengan ICT yang bukan hanya memberi aksesibilitas kepada berbagai informasi yang diperlukan masyarakat untuk melakukan aktivitas melalui jaringan internet, juga aksesibilitas kepada infrastruktur dan pelayanan publik yang ingin digunakan atau diperoleh masyarakat yang terhubung dengan ICT. ICT dapat menyediakan dengan cepat dan mudah bahkan murah kepada infrastruktur dan pelayanan

publik yang akan digunakan dan diperoleh masyarakat.

4. Kepemimpinan (Leadership)

Best practice dari *smart city* harus digerakkan dengan gaya kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan publik yang diambilnya (Syarifuddin et al., 2020). Paradigma pemerintahan dapat menentukan arah pembangunan pilar *smart city*. Paradigma pemerintahan yang berkembang saat ini menganut sistem terbuka seperti: 1) kelembagaan inklusif yaitu sikap terbuka dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang kuat (*sound*), 2) Collaborative Governance yaitu adanya sebuah forum deliberatif, di mana para stakeholder yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga mencapai sebuah konsensus terkait permasalahan publik, 3) Integrated governance menggambarkan struktur hubungan formal dan informal, untuk mengelola urusan melalui pendekatan kolaboratif (*join-up*) antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, 3) Open Governance adalah inisiatif melaksanakan integrasi layanan, keterbukaan akses informasi ke publik, keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

5. Transfer ke daerah lain (Transferability)

Best practice dari *smart city* dapat diterapkan di setiap wilayah dengan menyesuaikan potensi wilayah. Cakupan inovasi *smart city* ke kota dan kabupaten

yang belum terpilih pada gerakan ini. Untuk itu diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industry. Penyusunan *masterplan* dan *quickwin* kota pintar untuk 100 kabupaten/kota ini sendiri dilaksanakan dalam rentang waktu tiga tahun dari tahun 2017-2019. Pemilihan 100 kabupaten/kota tersebut diharapkan menjadi *role model* pelaksanaan kota pintar bagi daerah-daerah lain (Rizkinaswara, 2020).

B. Desain dan instrumen *best practice* pada konsep kampung atau desa tematik

1. Dampak (impact)

Best practice dari kampung atau desa tematik menciptakan dampak di setiap bidang yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat dan dampak Kampung atau desa Tematik (Bappedalitbang Majalengka, 2019):

- a. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasum dan fasos) yang lebih baik, dan tertata
- b. Pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Mendukung trademark wilayah tersebut menjadi ikonik, dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat seperti perubahan mindset dan perilaku warga, keberdayaan masyarakat,
- d. Diharapkan juga dapat memberikan pengaruh positif dan daya tarik (magnet) bagi kampung atau desa - kampung atau desa lainnya di

Kelurahan tersebut maupun Kelurahan lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan tematik serupa.

- e. Munculnya titik – titik kunjungan baru di setiap Kecamatan / Kelurahan yang tidak semuanya tersentral di tingkat Kota (terbangunnya sentra-sentra, rumah galeri) yang mendukung pengembangan potensi dan ikon Kota Semarang
- f. Diharapkan dapat menggugah Para Pemberi CSR untuk mereplikasi Kampung atau desa Tematik di Kampung atau desa / Kelurahan wilayah lain.

Dengan potensi yang beragam dan tersebar cukup merata, pengembangan desa tematik kreatif bagi Kabupaten Majalengka akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Keuntungan Ekonomi
Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari pembentukan desa tematik kreatif adalah meningkatkan lapangan pekerjaan; meningkatkan pemasukan masyarakat; meningkatkan PDB desa dan PDB Kabupaten Majalengka; meningkatkan financial literacy; meningkatkan arus modal ke desa; meningkatkan bisnis baru dan diversifikasi usaha; dan peningkatan jaminan kehadiran pemerintah.
- b. Keuntungan Sosial dan Budaya Desa
Keuntungan social dan budaya desa yang didapat akan merasakan keuntungan berupa promosi budaya

desa; peningkatan kesejahteraan sosial; pemerataan akses informasi; pemerataan akses pengetahuan; perbaikan struktur sosial; pendorong pengembangan infrastruktur; peningkatan kepercayaan diri, kebanggan dan kemandirian komunitas desa.

- c. Keuntungan Lingkungan
Peningkatan kesadaran konservasi dan peningkatan akses pembenahan lingkungan akan lebih mudah diperoleh desa yang telah ditetapkan sebagai desa tematik kreatif.

2. Kemitraan (Partnership)

Pelaku-pelaku Kreatif yang terdiri dari unsur-unsur ABCGM (Academy, Bussinis, Comunitas Government dan Media), mempunyai potensi yang besar dalam mendukung desa mewujudkan capaian Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Desa Tematik Kreatif merupakan salah satu Langkah strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif yang focus terhadap pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Metode pelaksanaan Desa Tematik Kreatif dengan tahapan-tahapan yang sistematis, terencana dan terukur dimungkinkan dapat

menjangkau masyarakat desa untuk ikut berkontribusi secara aktif berdasarkan potensi lokal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa (Bappedalitbang Majalengka, 2019).

3. Keberlanjutan (Sustainability)

Sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang kreatif dan komunal, pengembangan ekonomi kreatif, terutama yang berbasis kepada sumber daya alam terbarukan menjadi salah satu program pemerintah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang meletakkan desa sebagai titik sentral pembangunan, Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini focus terhadap kebijakan pembangunan yang bertumpu kepada pembangunan desa dengan pencapaian 18 Tujuan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pemangku kepentingan yang akan terlibat di dalam ekosistem adalah akademisi (academic), pelaku bisnis (business), komunitas (community), pemerintah (government) yang secara umum dikenal dengan ABCG yang dibantu dengan dukungan media. Para pemangku kepentingan di dalam ekosistem ekonomi kreatif memiliki hubungan yang kompleks antar aktor dan juga memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya (Bappedalitbang Majalengka, 2019).

4. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan Kepala Desa yang inovatif, progresif dan visioner. banyak kategorik yang didapatkan dari persepsi informan tentang strategi dan tipe kepemimpinan Kepala Desa yang menginspirasi sehingga mampu kepala membawa desa menjadi maju. Tema Kepemimpinan Kepala Desa terdiri dari tiga sub tema yaitu: progresif, inovatif dan visioner. Sub tema progresif terdiri dari sembilan kategori yaitu promotor, aktif, pengalaman, pengetahuan, nilai, musyawarah, pelayanan, keterbukaan dan SDM (sumber daya manusia). Sedangkan sub tema inovatif terdiri dari tiga kategori diantaranya unggulan, potensi dan inovatif. Serta subtema visioner terdapat tiga kategorik yaitu pembangunan, strategi dan visi itu sendiri.

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang substansial dan krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berNegara dan berbangsa, utamanya pada aspek pemerintahan, politik, ekonomi dan kemasyarakatan juga keagamaan. Hal ini menjadi fenomena yang paling sedikit dipahami dan paling banyak diamati. Fenomena kepemimpinan telah membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan berNegara, berpolitik serta berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidupnya. Untuk itu, pemimpin desa atau Kepala Desa menjadi poin penting dalam kemajuan desa (Sihotang & Nugroho, 2021).

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Kepala Desa harus mampu menjadi

pemimpin yang inovatif, sehingga dapat membawa kemajuan kepada desa yang dipimpinnya. Dari 3 situs ini, inovatif Kepala Desa berbeda-beda sebagaimana naluri kepemimpinannya sehingga tercermin kepada strategi dan gaya dalam memimpin desa. Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ataupun Pemerintah Kota (Pemkot) mendorong pemerintah desa untuk menggali potensi desanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa tematik perlu langkah strategis agar desa bisa menggali potensinya. Langkah itu diawali dengan sosialisasi masif kepada pemerintah desa hingga akhirnya terdapat beberapa desa binaan menjadi desa tematik (Sihotang & Nugroho, 2021).

5. Transfer ke daerah lain (Transferability)

Strategi pembangunan sosial di Kampung Tematik Kampung Purun adalah strategi pemerintah, komunitas, dan individu. Adapun modal masyarakat berupa modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia, modal sosial, dan modal politik. kampung dengan Program Kampung Tematik atau Desa Tematik. Lokasi kampung tematik dan desa tematik tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kota Semarang, Kota Malang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bandung (Sihotang & Nugroho, 2021). Negara lain juga berupaya mengembangkan desa tematik. Di Polandia, ide desa tematik berkaitan dengan satu

aktivitas penduduk yang dilakukan dengan skala yang lebih luas, di mana tema menjadi spesialisasi bagi desa. Polandia sudah mengembangkan desa tematik mulai tahun 2010 hingga 2012 sebagai salah satu strategi pembangunan pedesaan (Ghuszak, 2012).

Pelaksanaan Kolaborasi *Smart City* dan Kampung Tematik di Indonesia

Di Indonesia beberapa wilayah telah melakukan kolaborasi pembangunan dengan prinsip *smart city* dan kampung tematik. Seperti Di Majalengka. Majalengka menjadi awal permulaan kampung tematik. Bahkan setiap kecamatan di Majalengka memiliki sektor khusus mengenalkan keunggulan per kecamatan. Di setiap kecamatan membangun alun-alun sebagai pusat kegiatan dan mengenalkan potensi wilayah, seperti Alun-alun Cigasong, Munjul, dan lain-lain. Aset wisata di Majalengka juga mulai dikenalkan menjadi sektor wisata unggulan.

Pembangunan selanjutnya di Majalengka berprinsip *smart city*. Setiap pelayanan di Majalengka sudah menggunakan teknologi atau layanan berbasis digital. Tidak hanya itu, pembangunan juga di orientasikan pada pendidikan. Baik sekolah tingkat anak usia dini bahkan tingkat perguruan tinggi.

Keberhasilan kolaborasi ini mulai nampak di Majalengka. Tidak hanya ada di pusat Kabupaten Majalengka, setiap kecamatan juga mengalami pembangunan

yang signifikan untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kriteria *Best Practice* yang disesuaikan dengan arah pembangunan pusat kota/kabupaten dan pembangunan disetiap kecamatan dan kelurahan. Maka dapat mengkolaborasikan konsep *Smart City* dan Desa/Kampung Tematik. Pembangunan Daerah dapat diterapkan dengan program kolaborasi *smart city* dan Kampung atau desa tematik. Pembangunan di pusat pemerintahan Kota atau Kabupaten lebih sesuai dibangun dengan program *Smart City* dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi dan memperhatikan kearifan lokal. Khusus pembangunan disetiap penjurukota atau Kabupaten dapat menerapkan program Desa Tematik. Kampung atau desa tematik dapat meningkatkan dan memacu ekonomi lokal yang orientasinya mengolah potensi yang ada di masyarakat sebagai imunitas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas wilayah. Sehingga pusat Kota atau Kabupaten terjadi pembangunan yang tepat begitu juga pembangunan di setiap kecamatan dan kelurahan. Tidak ada daerah yang terlewat dari pembangunan. Pusat Kota atau Kabupaten dapat fokus pada pengembangan teknologi untuk kepentingan administratif dan sektor lainnya, sedangkan kecamatan dan kelurahan tidak diacuhkan dalam pembangunan. Terlebih lagi program yang diterapkan merupakan program dengan *best practice*. *Best Practice* memudahkan

duplikasi program di setiap wilayah. Perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam menggunakan potensi yang tersedia dan berbagai solusi lain yang dibutuhkan untuk menyesuaikan target yang ingin dicapai dalam pembangunan. Dengan adanya Desain dan Instrumen *Best Practice* pada konsep kolaborasi *Smart City* dan konsep kampung tematik untuk pembangunan daerah ini kita juga bisa tahu dari beberapa dampak beserta keuntungan dari masing-masing konsep kolaborasi tersebut melalui penelitian yang telah kami selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappedalitbang Majalengka. (2019). *Program Desa Tematik Kabupaten Majalengka*. Bappedalitbang Kab. Majalengka.
https://eksotik.majalengkakab.go.id/desa_tematik
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Ghuszak, B. (2012). Tam, Gdzie Miejsca Mają Duszę: Model Tworzenia Miejsowości Tematycznych (E. Sokołowska & A. Olszewska (eds.)). *Asosiasi Elbląg*.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019). *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*. *Buletinutama Teknik*, 14(2), 127–135.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/buletinutama/article/view/1097>

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muliarto, H. (2015). Konsep Smart City; Smart Mobility. *SAPPK-MPWK ITB*, 1(1), 1–13.
- Mulyadi, D. (2009). Disain Dan Instrumen Penilaian Best Practices Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 282–295.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *The 5 Th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*, 5(1).
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2007). *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Yappika.
- Putri, R. R., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2021). DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SMART CITY PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Madiun) Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , LPPM Unisma Jalan Myjen. *Jurnal Respon Publik*, 15(3), 19–24.
- Rizkinaswara, L. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City dalam Pembangunan Kota*. Ditjen Aplikasi Informatika.
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>
- Sidik, S. (2016). Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(1), 224–237.
- Sihotang, D. R., & Nugroho, F. (2021). Peningkatan Pembangunan Sosial Melalui Optimalisasi Program Kampung Tematik Kampung Purun , Kalimantan Selatan. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(1), 69–92.
<https://doi.org/10.7454/jpm.v2i1.1017>
- Simatupang, S. (2015). Smart City : Kerangka Untuk Pengembangan. *Scale*, 3(1), 371–381.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>
- Syarifuddin, T. I., Purnomo, E. P., Budiman, & Yasa, A. A. (2020). Comparative Study: Penggunaan Media Sosial oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kota Gold Coast. *Noken*, 6(1), 1–15.
- Wihana. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal AKTUAL*, 15(2), 75.
<https://doi.org/10.47232/aktual.v15i2.17>